

MARJINALISASI PEDESAAN AKIBAT RELASI KUASA LOKAL DAN SUPRALOKAL

Yunindyawati

Universitas Sriwijaya

Alamat Email: yunin.unsri@gmail.com

Abstract

This paper analyses the development of village as a sosial transformation in which it is always seen as a dynamic community and still exist on the continuum changes from time to time. To understand a sosial process in rural areas, especially related to the State as an super-local institution, it is necessary to consider the Law No. 5 of 1979 on the village governance. This is important because through that law, we can understand how the State intervene and shapes a lokal authority. This can be clearly seen through the uniformity of the village governance as an effort to gain a control mechanism over the local people. As a consequence, the State, in the name of development, create its agent within a rural governance.

Keywords: Rural Community, Sosial Transformation, Power and State Relations

Intisari

Tulisan ini hendak melihat perkembangan desa sebagai sebuah transformasi sosial dimana desa dipandang sebagai unit wilayah yang dinamis dan selalu berada pada kontinum perubahan dari waktu ke waktu serta dari masa ke masa. Untuk memahami sebuah proses sosial di pedesaan dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai institusi supralokal, maka stand pointnya adalah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Hal ini penting karena melalui UU tersebut kekuatan dan kekuasaan negara mengintervensi kekuasaan lokal desa dengan berbagai bentuk dan caranya. Desa kemudian diseragamkan sebagai upaya

mempermudah mekanisme kontrol negara atas desa. Pada perkembangan selanjutnya, negara dengan dalih pembangunan menjadikan desa sebagai objek sekaligus basis kekuasaan dengan membentuk pemerintahan desa sebagai agen pemerintah.

Kata Kunci : Desa, Transformasi Sosial, Relasi Kuasa dan Negara

Pendahuluan

Pada dasarnya memahami perkembangan dan transformasi sosial pedesaan bisa dilihat dari perkembangan sebagai sebuah proses dan perkembangan sebagai sebuah hasil interaksi desa dengan kekuatan di luar desa. Melihat perkembangan desa sebagai sebuah proses maka perspektif teori evolusi dan neo evolusi bisa dijadikan dasar analisisnya. Namun, jika melihat perkembangan desa sebagai sebuah hasil interaksi maka pendekatan Marxist dan neomarksis yang lebih relevan untuk menjelaskannya.

Tulisan Jean Pierre dan Oliver de Sardan dan Horison memaknai perkembangan desa sebagai hasil interaksi dengan kekuatan supralokal yakni negara dan kekuatan kapitalis global. Jika de Sardan lebih menekankan bagaimana perubahan terjadi dari aspek kultural, maka Harisson lebih menekankan pada perubahan dari aspek struktural. Jean Pierre dan Oliver de Sardan dalam bukunya *Anthropology and Development* melihat bahwa untuk memahami perubahan sosial dan pembangunan perlu untuk mengarusutamakan sosio antropologi dan mengingatkan bahwa perubahan kontemporer sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip antropologi. Hal ini perlu karena sosio antropologi adalah sebuah kedalaman secara empirik, multidimensi, diakronik, studi tentang kelompok sosial dan interaksinya. Kompleksitas perubahan dan pembangunan perlu di *tackle* oleh sosio antropologi.

Eksistensi konfigurasi pembangunan adalah seperangkat institusi, aliran dan aktor, untuk siapa pembangunan, sumberdaya, profesi, pasar, negara atau strategi, merupakan obyek studi sosio-antropologi. Proses dan fenomena sosial berkaitan erat dengan pembangunan, politik pembangunan, pelaksanaan pembangunan, infrastruktur, dan proyek pembangunan. Sosiologi dan antropologi dalam hal ini, tidak bisa dipisahkan dan berkaitan erat, untuk menganalisis proses pembangunan, diperlukan dialog dan kerjasama antara pelaksana dan institusi. Di satu sisi pelaksana bisa didekati

secara kultural secara antropologis dan secara institusional sosiologi bisa menjelaskannya.

Pembangunan pedesaan dipahami sebagai kenyataan perubahan sosial dapat menyumbang pembaruan ilmu sosial. Pembangunan adalah produk akhir dari multi interaksi dan tidak ada model ekonomi yang bisa memprediksinya tetapi antropologi bisa mendiskripsikan dan mengintrepetasinya. Pertentangan berbagai logika sosial yang membayangi proyek pembangunan merupakan fenomena sosial yang kompleks dimana para ekonom, ahli pertanian dan pengambil kebijakan cenderung mengabaikannya. Konsekuensinya budaya dan nilai lokal penduduk asli pedesaan sebagai obyek pembangunan melakukan sesuatu yang bukan menjadi cara hidup mereka. Mereka kehilangan pandangan bahwa budaya adalah konstruksi subjektif untuk keberlangsungan proses sinkritis dan objek dari simbol perjuangan.

Studi yang berkembang pada akhirnya memarjinalkan aspek antropologis masyarakat dalam dunia pembangunan maupun dunia ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa marjinalisasi status antropologi dari perubahan sosial dan pembangunan pada pandangan publik pembangunan sama halnya marjinalisasi publik dalam penelitian sosial. Pendekatan komparatif pada dasar antropologi pembangunan memiliki dua karakteristik yaitu pandangan multikultural dari situasi pembangunan dan penggolongan dari konsep dan praktik aktor yang berkaitan dalam situasi ini.

Aspek *multiculturalism*, situasi pembangunan membawa dua perbedaan kata yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ada basis kosmopolitan, kultur internasional, kultur dari konfigurasi pembangunan, yang terdiri dari subkultur (transnasional), dalam clan-clan atau asosiasi kepentingan yang didasarkan pada kepentingan ideologi atau profesi yang kurang lebih sama di seluruh dunia (mendunia). Di sisi lain masih terdapat keberadaan budaya lokal dengan subkulturnya. **Aspek *transversality*/penggolongan** bisa diamati dari konsekuensi pembangunan yang selalu membawa serta spesialisasi keahlian, spesialisasi organisasi, dan spesialisasi temuan yang terjadi di area kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, reformasi administrasi, desentralisasi atau kemajuan wanita.

Intervensi berbagai kampanye program pembangunan kenyataannya di tingkat dasar dan tingkat klien institusi pembangunan (apparatus) tidak terlalu memperhatikan perpecahan. Namun praktik umumnya dan gambarnya, meninggalkan perpecahan sektoral. Terdapat perbedaan antara logika pengetahuan dan logika tindakan

pembangunan. Para ahli pembangunan memiliki logika yang mempertimbangkan pasar sebagai sebuah arena, berbeda dengan paradigma moral sebagai elemen fundamental dari meta-ideologinya. Pelaksana pembangunan menggunakan logika status mereka atau berbagai strategi yang harus ditempuh sebagai profesional dalam arena pasar, bersama-sama dengan aktivis dunia ketiga, organisasi voluntir non profit, kerjasama personal atau koordinator lokal. Mengejar aktor pembangunan beserta moralitasnya akan ditemukan disparitas besar dari kepentingan-kepentingan para aktor, dan ini menjadi penelitian sosiologi.

Ruang isolasi antara ilmu sosial dan pelaksana pembangunan ditandai dengan jaranganya berinteraksi. Kontak antara keduanya hanya retorika atau studi yang melibatkan finansial saja. Ilmuwan sosial tidak bisa mendekatkan logika institusional mereka dan tertutuplah logika akademik dalam pembangunan. Para pelaksana pembangunan juga kurang menggunakan hasil penelitian ilmuwan sosial dalam berbagai program pembangunan. Akibatnya pemaknaan pembangunan oleh negara akan berbeda dengan pemaknaan penduduk/masyarakat desa.

Jika pelaksana pembangunan melibatkan ilmuwan sosial, mereka dipekerjakan oleh pelaksana pembangunan yang telah memiliki terminologi sendiri. Tidak jarang mereka dijadikan konsultan yang pada akhirnya juga menjadi aparatus pembangunan. Sementara itu, David Harrison dalam bukunya *The Sociology of Modernization and Development* menggambarkan modernisasi dari aspek perkembangan teoritis dalam memandang modernisasi sebagai sebuah proses transformasi sosial. Menurutnya modernisasi dan tradisional dilihat sebagai sebuah anti tesa. Dia juga mengkontestasikan modernisasi dengan pembangunan. Di awal tulisannya, dia menjelaskan panjang lebar tentang teori evolusionisme, devolusionisme, struktural fungsional dan teori interaksionisme dikombinasikan untuk menjadi teori modernisasi.

Teori modernisasi awal menekankan pada faktor internal dari suatu masyarakat tertentu. Umumnya dilihat dari analisis struktural fungsional yang menekankan peran nilai, budaya, agama yang menjadi perhatian modernisasi. Teori awal modernisasi dilihat dari pemikiran Durkheim tentang tahapan masyarakat rendah dan tahap tinggi, bergerak dari masyarakat sederhana tidak terdeferensiasi menuju masyarakat lebih kompleks (mekanik ke organik). Masyarakat mekanik merupakan gambaran masyarakat tradisional sementara masyarakat organik sebagai gambaran masyarakat modern. Kemudian

teori Talcott Parson tentang struktural fungsional tradisional ditandai oleh peran yang banyak bisa dilaksanakan oleh individu sementara pada masyarakat modern pelaksanaan peran lebih terspesialisasi berdasar peran dan statusnya dalam masyarakat. Variable berpola menjadi dasar dikotomi dalam orientasi peran yaitu: *affect VS Neutral, self orientation VS collective orientation, universalisme VS particularism, ascription VS achievement, functional specificity VS functional diffuseness*.

F.Tonnies melihat masyarakat tradisional dimana pola hubungannya didasarkan pada komunitas (*Gemeinschaft*), sementara modern lebih didasarkan pada asosiasi (*Gesellschaft*). Sementara itu, Levy dan Hoselitz, melihat modernitas dari kacamata struktur ekonomi dan sosial masyarakatnya. F.W. Riggs mengemukakan masyarakat tradisional, transisi merupakan masyarakat *homogeny (fused society)*, sementara masyarakat modern terdiferensiasi (*Diffacted*). Sementara itu, Daniel Lerner melihat bahwa modernisasi adalah proses global, terjadi kesamaan di berbagai bagian dunia. Smelser dan Rostow menempatkan perspektif yang lebih umum dalam menganalisis pembangunan. Smelser melihat efek pertumbuhan ekonomi terhadap struktur sosial masyarakat dengan indikator antara lain: pergerakan dari teknologi yang simple ke kompleks, perubahan dari pertanian subsisten ke tanaman *cashcrops*, pergerakan dari penggunaan kekuatan binatang dan manusia menuju industrialisasi, pertumbuhan penduduk urban. Pada masyarakat lokal/kondisi lokal, terjadi diferensiasi struktural dan untuk mengatur kohesivitas sosial muncul mekanisme integratif baru.

Rostow melihat modernisasi melalui penahapan masyarakat dalam lima kategori: masyarakat tradisional, masyarakat pra kondisi untuk *take off*, masyarakat tinggal landas, masyarakat *maturity* dan masyarakat *high consumption*. Modernisasi memerlukan "agen perubah" seperti innovator untuk merembeskan ide baru ke semua tempat: innovator, *diffuser*, agen pemerintah, menjadi mekanisme bagi masyarakat manusia untuk sampai pada modernitas.

Semua teori modernisasi di atas merupakan teori yang beraliran evolusionisme yang memandang transformasi masyarakat sebagai sebuah garis linier. Di bukunya Harison juga menggambarkan adanya variasi teori modernisasi bahwa tidak ada teori modernisasi yang tunggal yang dikemukakan oleh Barrington Moore dan Bendix. Menurutnya terdapat tiga rute masyarakat pra industri menuju modernisasi. Untuk bisa sampai pada modernisasi, perlu pentingnya inovasi politik sebagai kunci modern adalah status kepemimpinan.

Modernisasi tidak unilinier karena ternyata ada tiga rute menuju modernisasi dan pentingnya ruang politik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teori evolusionisme klasik yang dikemukakan oleh: Tylor, Morgan, Durkheim dan Spencer pada dasarnya bertumpu pada tiga hal: *pertama*, teori modernisasi yang memfokuskan pada unit negara dengan menggunakan metode analisis struktural fungsional. *Kedua*, teori modernisasi secara implisit maupun eksplisit adalah evolusioner sebagaimana dikemukakan oleh para ahli teori evolusi. *Ketiga*, teori modernisasi cenderung pada ide postulat bahwa masyarakat bersifat dualistik.

Teori modernisasi awal mendapat kritikan dari pandangan teori *underdevelopment* yang dimotori A. G. Frank, Wallerstein dan Amin. Pemikiran mereka terangkum sebagai berikut:

1. Kemajuan dan keterbelakangan adalah aspek esensial dari proses ekonomi yang sama sehingga yang lebih dulu akan lebih maju;
2. Kemajuan diistilahkan dengan otonomi, keberlanjutan pertumbuhan industrial;
3. Sistem kapitalis dunia menyatakan ketika Negara Barat mengembangkan perdagangan berhubungan dengan Negara non Eropa secara gradual terjadi *incorporasi* kepentingan dunia sehingga terjadi pertukaran sistem internasional;
4. Mekanisme yang dibuat oleh sistem kapitalisme dunia mengatur pertukaran yang tidak seimbang sehingga hubungan menjadi tidak simetris yang terefleksi dari disparitas militer dan ekonomi;
5. Dunia dipisahkan dalam dua atau tiga kelompok utama yakni negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi besar sebagai *centrum*, *core* metropolis sementara negara kurang berpengaruh sebagai negara terbelakang, *phery-phery* atau satelit;
6. Dunia adalah sebuah sistem ekonomi, secara esensial terjadi surplus nilai dari ekstraksi kaum buruh di negara *phery-phery*;
7. Perusahaan transnasional, secara khusus menjadi agen utama neo kolonialisme dan menjadi mekanisme vital dalam transfer surplus dari peri-peri ke semi peri-peri ke center dan
8. Ruang manuver negara terbelakang dibatasi. Mereka akan maju jika mereka membuat jaringan antar mereka dan memutus hubungan dengan negara pusat kapitalis.

Tulisan ini hendak mengkaji tentang bagaimana relasi kuasa desa dan kekuatan luar desa, apakah desa sebagai objek kekuatan luar sehingga tersubordinasi dalam relasi hubungannya. Tulisan ini juga

akan menganalisis konsekuensi dari interaksi desa dan kekatan luar desa, apakah konsekuensi logis, sistemik dan sosiologis bisa berupa kehilangan jati diri, posisi subordinat, lemah termarginalkan, sebagai peri-peri atas kota atau negara. Serta konsekuensinya pada masyarakat desa adat yang memiliki nilai-nilai lokal dan masyarakat desa yang relatif terbuka, apakah pada masyarakat yang relatif terbuka intervensi dan interaksi relatif diterima dan mudah mendapatkan pemaknaan yang sama antara masyarakat lokal dan pemerintah dibanding pada masyarakat adat yang memiliki nilai lokal yang unik dan spesifik. Artinya juga apakah pembangunan pada masyarakat adat relatif memporak-porandakan *indigenous knowledge* dan *local wisdom* yang ada.

Program Pengembangan Desa

Pembangunan pedesaan bisa diamati dari berbagai perspektif dan dari sudut pandang aktor yang berkepentingan dalam memahami desa. Bagi pemerintah pembangunan pedesaan dimaksudkan untuk bisa menempatkan desa dalam kerangka kepentingan pemerintahan yakni sebagai bagian dari basis kekuatan sosial politik dan kekuasaan. Karenanya pemerintahan desa sebagaimana UU No. 5 Tahun 1979 pada dasarnya adalah alat Negara untuk mengontrol desa agar sesuai dengan keinginan dan pemaknaan pembangunan pemerintah.

Pada saat pelaksanaan program pembangunan revolusi hijau misalnya, Negara memaknainya sebagai upaya pengentasan kekurangan dan kemiskinan pangan yang melanda. Harapannya dapat mengentaskan rakyat dari kelaparan. Namun, ternyata penerapan revolusi hijau membawa dampak sosial budaya yang cukup mencengangkan. Para perempuan kehilangan otoritas atas tanaman, pengetahuan lokal tentang pertanian padi di babat dengan teknologi pertanian, diferensiasi dan stratifikasi sosial di pedesaan makin kentara dan bahkan banyak petani gurem harus kehilangan sawah karena mahalunya saprodi pertanian dan lebih menguntungkan bekerja sebagai buruh tani atau bermigrasi ke kota. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi negara telah membuat masyarakat terutama masyarakat miskin terpinggirkan dari proses produksi pertanian; mulai dari pembuatan bibit lokal, pupuk kandang diganti urea dan lainnya.

Di **bidang kesehatan** intervensi berbagai program telah menggusur pengetahuan lokal dalam mencegah dan mengobati penyakit. Misalnya, ramuan tradisional berbasis lingkungan lokal

menjadi punah dan tidak diminati. Yang terjadi adalah penyeragaman pengobatan dari Negara ke seluruh pelosok nusantara. Lembaga dan organisasi kesehatan, seperti posyandu menggantikan peran kelembagaan lokal dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Bidan desa sebagai program pemerintah menggantikan peran dukun bayi dalam menolong persalinan. Padahal, pengetahuan paraji telah turun temurun jika tidak dilestarikan maka *indigenous knowledge* juga akan tersingkir.

Memang tidak bisa dipungkiri kemajuan di bidang kesehatan telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan penduduk, tetapi akan lebih baik jika program kesehatan itu diintervensikan dengan tanpa menghilangkan kemampuan lokal dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Artinya, kemampuan lokal tetap dipelihara, sehingga aspek sosio kultural menjadi tidak terputus. Sejatinya eksistensi masyarakat desa berada pada kemampuan lokal untuk menunjukkan pengetahuan, kemampuan dan kekuasaan lokal mengurus mengatur dan memiliki tata kelola dalam kehidupan masyarakat mereka.

Dilihat dari **aspek ekonomi**, intervensi Negara dan kapitalisme global telah memporak-porandakan perekonomian desa yang awalnya dibangun oleh semangat solidaritas, kebersamaan, keguyuban, tenggang rasa dalam masyarakat. Perekonomian desa sebagai soko guru pembangunan berlandaskan asas kebersamaan berkeadilan menjadi perekonomian yang bersifat individualistis. Bahkan, lebih parah lagi perekonomian desa menjadi bersifat predator terhadap kaum lemah. Sesuai asas ekonomi kapitalis demi keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya antar individu dalam masyarakat saling berlomba menumpuk materi tanpa mempertimpangkan aspek moralitas. Kelembagaan ekonomi yang dibangun pemerintah untuk desa, seperti KUD sebenarnya bukan kelembagaan yang bisa mengakar pada rakyat. KUD menjadi sangat bersifat organisatoris dibanding kelembagaan ekonomi yang lain. Konsekuensinya ia tidak bisa mendarah daging dalam masyarakat. Bahkan, KUD telah menggantikan kelembagaan lokal yang dibangun masyarakat secara turun temurun sebagai basis ekonomi masyarakat lokal, seperti lumbung padi. Lagi-lagi persoalan pemaknaan yang berbeda antara masyarakat dan pembangunan membawa konsekuensi sosial kultural yang mengkhawatirkan eksistensi lokal.

Secara struktural sebagaimana pendapat Harrison, relasi kuasa lokal dengan supralokal baik Negara maupun pasar membuat desa

berada pada posisi minor daripada mayor, sebagai objek daripada subjek, menjadi yang tergantung dari pada yang disandari, menjadi peri-peri/satelit dari pada sebagai pusat atau inti. Semua ini terjadi karenaketidakseimbangan relasi kuasa lokal dan supra lokal. Pada konteks pembangunan pedesaan dikeluarkan UU No 5 Tahun 1979 membawa konsekuensi struktural yang luar biasa bagi desa. Struktur sosial pedesaan yang dibangun dalam kurun waktu lama dan mengalami perkembangan secara evolusioner dari waktu ke waktu dari masa kemasa, digantikan oleh struktur yang diintervensikan dari atas yakni oleh Negara. Mekanisme struktural yang dibangun desa dengan segala kekhasannya telah mampu mengatur keberlangsungan hidup masyarakat desa digantikan tatanan baru yang berbeda sama sekali dan bahkan tidak dimengerti oleh warga desanya. Hal ini terutama terjadi masyarakat adat dengan struktur masyarakat yang masih asli dan memiliki pranata sosial yang fungsional dalam masyarakatnya, seperti masyarakat Badui di Banten, Suku Anak Dalam di Jambi, masyarakat Sakai di Riau, suku Dayak di Kalimantan dan Suku Dani di Papua. Ketika ada intervensi pembangunan, maka perbenturan nilai budaya dan struktur kelembagaan adat lebih hebat dibanding desa terbuka yang lebih luwes melakukan adaptasi terhadap pembangunan. Karenanya masyarakat adat sekan menjadi korban yang paling berdarah-darah dalam proses pembangunan Negara.

Konsekuensi logis secara struktural dari relasi lokal dan supralokal dapat diamati dari aspek “kemerdekaan” desa/lokal. Sebelum adanya relasi dan intervensi Negara dan pasar. Desa sangat merdeka memiliki struktur sosial, ekonomi, politik yang khas yang disepakati bersama. Setelah berinteraksi ternyata desa kehilangan otoritas dan kemerdekaannya dan senantiasa tergantung pada Negara. Hal ini bisa ditunjukkan dengan contoh untuk mengatasi persoalan ekonomi desa berupa kemiskinan, masyarakat mengharapkan Negara memberi bantuan secara ekonomi padahal dulu masyarakat miskin menjadi tanggungjawab masyarakat desa dengan kedermawanan anggota desayang lebih mampu. Sekarang, nilai kedermawanan telah mengendur digantikan nilai individualistik.

Negara dan pasar juga sengaja menciptakan agar masyarakat desa tetap dan terus bergantung melalui mekanisme struktural dan kultural. Secara struktural diciptakan pemerintahan desa sebagai apparatus pemerintahan untuk mempermudah mengontrol desa agar tetap bergantung. Secara kultural sengaja atau tidak sengaja nilai-

nilai budaya lokal digerus terus menerus sehingga desa kehilangan jati dirinya. Sistem kapitalis juga memasuki desa dengan melalui mekamisme struktural maupun kultural. Secara structural kapitalis menjadikan pemerintah desa sebagai agen dan korporasi untuk mendirikan pasar kapitalis. Secara kultural masyarakat dihegemoni dengan pandangan materialistik yang mendewakan kelimpahan dan kemewahan sebagai tujuan hidup yang bahagia.

Konsekuensi logis, sistemik dan sosiologis relasi kuasa lokal dan supralokal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Relasi Lokal dan Supra-lokal

Status desa	Logis	Sistemik	Sosiologis
Desa terbuka	Intervensi program pembangunan (Revolusi, hijau, kesehatan dan ekonomi dll): akan mempengaruhi desa dimana desa terbuka akan relative melakukan adaptasi secara berangsur angsur (evolusioner) terhadap program tersebut. Hal ini relatif mudah karena desa terbuka relatif telah mengenal modernisasi pembangunan. Sehingga perubahan sosial yang dialami lebih bersifat evolusi dari pada revolusi.	Kelembagaan lokal desa melakukan adaptasi dengan kelembagaan Negara dan pasar. Melalui mekanisme seperti ini Negara dan pasar relatif mudah masuk kelembagaan desa. Sebenarnya secara tidak sadar kelembagaan Negara dan pasar telah menghegemoni lokal sehingga lambat laun tapi pasti kelembagaan lokal akan hilang	Pola hubungan kemasyarakatan mulai bergeser secara evolusioner dari pola kebersamaan menuju individualistik. Dari kekerabatan menjadi asosiasi kepentingan.

Masyarakat Adat	Bagi masyarakat adat dengan nilai, pranata yang masih kuat akan relatif tertutup terhadap program pembangunan sehingga ketika terjadi intervensi Negara dan pasar akan terjadi perbenturan hebat pada masyarakat lokal. Karenanya perubahan sosial yang terjadi akan bersifat revolusioner, berdarah-darah. Terdapat loncatan yang terlalu besar untuk bisa memaknai program pembangunan baik secara kultural maupun cultural	Kelembagaan masyarakat adat mengalami <i>Shock cultur</i> ketika dihadapkan pada kelembagaan baru. Akibatnya masyarakat menjadi teralienasi thd berbagai program pembangunan yang berdampak pada ketidakefektifan program bagi masyarakat adat. Alih-alih kesejahteraan yang di dapat justru kemunduran lokal	Hubungan sosial pada masyarakat adat terbagi orientasinya antara memilih pranata lama yangselama ini menjadi guidenya dengan pranata baru yang memaksa terjadinya perubahan hubungan sosial dan kekerabatan. Misal administrasi pemerintahan mempengaruhi interaksi sosial masyarakat adat.
-----------------	---	---	---

Sumber: Disarikan dari beberapa bahan, 2014

Berdasarkan tabel di atas secara sederhana bisa diambil kesimpulan sementra bahwa program pembangunan pedesaan telah memicu perubahan/transformasi sosial masyarakat yang berbeda antara masyarakat adat dan masyarakat desaterbuka. Perubahan sosial pada masyarakat desa terbuka bersifat evolusioner, melalui mekanisme adaptasi seiring dimensi waktu. Sementara, transformasi sosial masyarakat adat bisa terjadi secara revolusioner karena pengaruh program pembangunan. Masyarakat dipaksa secara kultural maupun struktural memaknai pembangunan seperti pemerintah memahami pembangunan. Konsekuensinya terjadi loncatan yang besar anata apa yang diketahui dengan apa yang harus dilakukan yang menyebabkan mereka teralienasi.

Contoh, kasus desa adat yang relevan dengan analisis ini adalah pada masyarakat suku Sakai di Riau. Orang Sakai di kabupaten Bengkalis Riau khususnya di kecamatan Mandau dikategorikan sebagai suku terasing baik secara structural maupun secara fungsional dalam kaitannya dengan sistem nasional Indonesia, sebagaimana

didefinisikan departemen sosial RI waktu itu. Definisi terasing menjadi tidak relevan yang lebih relevan adalah masyarakat asli karena mereka memiliki sistem sosial dan budaya yang relatif mantap dan dengan sistem tersebut mereka mampu hidup secara subsisten.

Posisi orang Sakai yang rendah dalam struktur masyarakat Indonesia di Riau telah menjadi kentara melalui kemunculan dan kemantapan ketergantungan mereka terhadap pemerintah melalui pembinaan oleh departemen terkait. Ketergantungan terhadap pemerintah makin jelas melalui berbagai jatah makanan dan berbagai kebutuhan lainnya, melalui interaksi dengan petugas lapangan dengan masyarakat setempat yang dimukimkan dalam program PKMT (pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing) yang terwujud melalui berbagai bentuk pembinaan.

Orang Sakai kemudian memanfaatkan keuntungan ini untuk tidak usah bersusah payah membuat *lading* dan berkebun ubi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini semakin menguatkan ketergantungan mereka terhadap pemerintah. Kemerdekaan memproduksi ubi digantikan program bantuan/jatah makanan telah membunuh kreativitas mereka. Dampaknya adalah mereka akan tidak atau kurang mampu melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan sosial dan budaya dalam lingkungan mereka sendiri.

Secara individual orang Sakai yang mampu mengantisipasi perubahan-perubahan adalah mereka yang mengacu bukan pada materi yang ada dalam PKMT tetapi pada mekanisme pasar dan pada materi informasi yang mereka peroleh dari TV, Radio dan sumber media massa lainnya. Hal ini menjadi ilustrasi bagaimana program PKMT yang diintervensikan pemerintah membuat masyarakat Sakai yang awalnya independent menjadi tergantung, menjadi tidak kreatif, dan memunculkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdeferensiasi dan terstratifikasi.

Penutup

Perkembangan masyarakat desa sebagai proses transformasi sosial masyarakat desa dapat dipahami sebagai proses evolusi jika dilihat dari dimensi waktu. Dari masyarakat tradisional menuju modern, masyarakat homogeni ke heterogen dari fused ke *refracted*, dari kurang terspesialisasi ke terspesialisasi. Namun, memahami transformasi pedesaan tidak bisa lepas dari proses interaksi desa dengan kekuatan lain diluar desa. Oleh karena itu, pandangan neo Marxist bisa menjelaskan didukung oleh pandangan antropologi

pembangunan dimana dari proses interaksi itu menghasilkan subordinasi desa atas negara dari sisi struktural maupun kultural. Hal ini terjadi karena pembangunan sebagai agen perubahan sosial pedesaan sering kali juga menjadi agen kapitalisme global yang membawa nilai neo liberalism. Karenanya memahami perubahan sosial pedesaan akan ditemukan perbenturan kelembagaan termasuk nilai-nilainya antara desa melawan negara (pembangunan) dan kapitalis global serta perbenturan kepentingan lokal desa dan kepentingan pembangunan negara dan kapitalis yang cenderung menjadikan desa sebagai ranah untuk eksploitasi sumberdaya, baik alam maupun manusia dan menjadikan mereka sekaligus sebagai target pasar. Perbenturan kepentingan lokal dan supralokal ini akan dialami lebih hebat oleh masyarakat adat daripada masyarakat desa terbuka/termodernisasi. Pada akhirnya relasi kuasa lokal dan supralokal akan membawa desa dan adat menjadi termarjinalisasi.

Daftar Bacaan

Hoogvelt, Ankie. 1995. *Sosiologi Masyarakat sedang Berkembang*. Jakarta: Rajawali pers.

Harrison, David. 1988. *The Sociology of Modernization and Development*. London and New York: Routledge

Pierre, J and Sardan, O. 2005. *Anthropolgy and Development*. London and New York: Zed Books

Suparlan, Parsudi. 1995. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.

